

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Keberadaan BUMDes juga membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal. Melalui BUMDes ini nanti pendapatan desa bisa lebih terukur dan menghasilkan, guna mendukung tambahan sumber pendapatan lainnya berupa PAD untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya dalam mewujudkan suatu tujuan dari negara. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional bukan hanya sebagai tugas pemerintah, dikarenakan pemerintah hanya mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat dari tingkat global sampai tingkat terkecil yaitu masyarakat desa. Sejak diberlakukannya dana desa pemerintah desa mewajibkan membentuk badan usaha untuk mensejahterakan masyarakat desa. (Budyanto, 2006)

Masyarakat desa dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam mengalokasikan dana desa dengan menggali potensi desa yang akan dikembangkan sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Menurut Nelson, Bryant dan White menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi dari masyarakat itu sendiri akan menjadikan masyarakat semakin mandiri tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas lapangan karena badan usaha ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dan dengan persetujuan pemerintah desa.

Wilayah desa memiliki potensi yang begitu besar, sumber daya alam yang melimpah menjadi kelebihan yang dimiliki oleh desa, daerah perdesaaan juga sangat cocok digunakan sebagai pemukiman karena dengan sumber daya alam yang melimpah masyarakat dapat mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Desa juga dapat membangun sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat desa akan dapat dirasakan jika masyarakatnya mampu bekerjasama dan pemerintah desa yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menggali sumber daya alam yang dimiliki oleh desa yang dapat dikembangkan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa. Kondisi masyarakat desa dapat digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang sebagian besar kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam. Apalagi di pulau Kalimantan keberadaan hutannya masih alami dan masih banyak lahan hijau, dan letaknya berada di jalur khatulistiwa sehingga sumber daya alam disana cukup melimpah.

الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبْنِيكُمْ وَالشَّهَادَةِ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (At Taubah/9:105)

Dalam tafsir ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk beramal dan bekerja bersungguh-sungguh. Proses itulah yang akan dilihat dan menjadi nilai baik disepanjang hidupnya. Allah SWT memberikan motivasi bahwa proses yang baik akan memuahkan hasil yang bagus, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Hubungan dari tema penulisan ini terhadap ayat QS At Taubah 9/105 yaitu ketika seorang atau suatu kelompok berniat untuk mensejahterakan umat maka hal tersebut termasuk beramal. BUMDes sebagai Lembaga yang menjadi wadah untuk mewujudkannya. Dengan membangun dan mengembangkan potensi desa akan memberikan dampak baik kepada masyarakat yang ada di dalamnya dan semangat gotong royong untuk satu tujuan yaitu kesejahteraan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan potensi desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dijelaskan juga bahwa tujuan didirikannya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama dalam bidang perekonomian. Dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDesa pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yaitu pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 78 tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2) bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Pengelolaan dalam BUMDes itu sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa tersebut, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Kinerja dari BUMDes itu sendiri yaitu dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu kelembagaan ataupun badan usaha yang dikelola secara profesional sesuai dengan potensi desa yang ada. Dengan adanya BUMDes dapat menjadikan berbagai macam potensi desa yang menjadi ciri khas desa yang menjadikan usaha masyarakat desa yang ada menjadi lebih berkembang dan produktif.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya menurut buku panduan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama,
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PEMDes, BPD, anggota).

Pada saat tahun 2015 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menargetkan pendirian dan pengembangan 5.000 BUMDes di tanah air namun pada awal tahun 2019 meningkat enam kali lipat melampaui target pemerintah yaitu telah mencapai 35.000 BUMDes dan akan terus tumbuh. Meski jumlahnya terus bertambah, masih banyak desa yang belum mengerti arah dan tujuan BUMDes yang telah terbentuk. Pembentukan BUMDes tidak hanya semata-mata menjadi wadah agar dana desa disalurkan sesuai program prioritas namun BUMDes yang seharusnya menggerakkan perekonomian desa dan menjadikan desa tersebut desa mandiri.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diupayakan tidak memberatkan masyarakat, malah sebaliknya dimana dalam BUMDes ini yang akan dijadikan sebagai usaha desa dalam menggerakkan perekonomian desa dan mewujudkan tujuannya. BUMDes juga tidak hanya melayani anggota masyarakatnya, akan tetapi juga melayani kebutuhan yang ada diluar desa dengan menetapkan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar. Dengan adanya BUMDes dapat memicu semangat kewirausahaan dan kemandirian desa. BUMDes dipenelitian ini bisa dikatakan masih berjalan di tempat karena strategi dari *stakeholder* desa kurang maksimal.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah yang beribukotakan Palangkaraya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km² dan Semboyannya adalah "*Handep Hapakat*" yang berartikan persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat. Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 4 kelurahan, 8 kecamatan, 94 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Garantung di kelurahan Maluku dalam pengembangan sektor agribisnis.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Pulang Pisau yang damai, maju, berkeadilan dan sejahtera. Dengan salah satu misi yang berkaitan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan. Desa-desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau mengembangkan keunikan masing-masing sebagai daya tarik utamanya dan memiliki beragam potensi, mulai dari potensi alam, budaya, pertanian hingga kemampuan inovasi dalam pengelolaan rotan menjadi anyaman.

Sebagian besar penduduk berasal dari Suku Jawa sebagian lagi dari suku Dayak dan suku Banjar. Mata pencaharian penduduk paling banyak pada sektor Pertanian dan Peternakan dan jumlah Desa di Pulang Pisau ada 8 kecamatan, 91 desa definitif dan 1 desa yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Tabel 1.1.

Data Indeks Desa Pembangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

Klasifikasi	Jumlah	%
Desa Maju	2	2.11%
Desa Berkembang	43	45.26%
Desa Tertinggal	42	44.21%
Desa Sangat Tertinggal	8	8.42%
Jumlah	93	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Dilihat dari data IDM bahwa jumlah desa berkembang mendominasi dengan 43 desa dengan 45.26%. Sedangkan jumlah desa maju hanya 2 desa dengan 2.11% saja. Rata-rata nilai indeks desa pembangunan yaitu 0.5849 dengan kesimpulan tertinggal. Dalam artian dimensi pelayanan dasar dan kesejahteraan dan aspek-aspek lainnya perlu di tingkatkan.

BUMDes merupakan salah satu dari 4 prioritas Kementerian Desa yang memang harus dikembangkan dan pemerintah mengumumkan bahwa masing-masing desa harus mendirikan BUMDes untuk menjadikan desa tersebut desa yang Mandiri. BUMDes akan menjadi suatu mesin yang akan mewujudkan visi dan misi dari pemerintah jika Program dan pelaksanaannya terstruktur dan terprogram dengan baik. Dalam jurnal (Adiwiyah, 2018) menyatakan jika penyusun dan pengelola dari pengurus optimal maka berpengaruh kepada kinerja BUMDes dalam menjalankan unit usahanya.

Tabel 1.2.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Kahayan Hilir	7	7	7
2	Kahayan Kuala	10	11	12
3	Banama Tingang	2	3	3
4	Pandih Batu	9	9	9
5	Maliku	15	15	15
6	Sebangu Kuala	7	7	7
7	Jabiren	7	7	7
8	Kahayan Tengah	13	13	13
	Jumlah	70	72	73

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah*

Dilihat dari tabel 1.2. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 8 kecamatan yang masing-masing kecamatan tersebut memiliki BUMDesnya sendiri dan setiap tahunnya memiliki peningkatan jumlah. Kecamatan Maliku menyumbangkan BUMDes terbanyak yaitu 15 badan usaha dari total 73 badan usaha yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Maliku yang akan menjadi fokus dalam penulisan ini.

BUMDes di Kabupaten Pulang Pisau bernama “BUMDes Garantung Makmur” yang didirikan pada tahun 2016 sesuai kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan perdes No. 01 tahun 2016. Berdirinya BUMDes ini tidak lepas dari visi dan misi yaitu mewujudkan sistem pemerintahan desa yang mengakar dengan masyarakat dan meningkatkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur.

Terbentuknya BUMDes ini diharapkan dapat membantu desa dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, terkhusus dalam bidang ekonomi demi mensejahterakan masyarakat desa. Terkait hal tersebut BUMDes Garantung Makmur memiliki modal awal dari desa sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembembangan BUMDes dan dikelola langsung oleh ketua, bendahara, sekretaris dan kepala bidang pengelola.

Berdasarkan informasi pemberitaan dari *Tabengan.com*, Desa Garantung menjalin kerjasama baik dengan BNI cabang Pulang Pisau dan Perum Blog Divisi Regional Kalimantan Tengah, untuk mendukung ekonomi kerakyatan lebih luas lagi. Pemberitaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Pulang Pisau, Syaripul pada saat diwawancara pada survei yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 dan beliau menambahkan bahwa dengan adanya BUMDes yang maju, diharapkan dapat mewujudkan desa mandiri dengan kesejahteraan warganya.

BUMDes Garantung Makmur memiliki visi mewujudkan desa yang sejahtera dan misinya yaitu meningkatkan Pendapatan Anggaran Desa (PADes), meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes Garantung Makmur memiliki usaha atau program dari produk unggulan yang bergerak dalam bidang agribisnis jagung hibrida, penyewaan jasa alsintan (alat mesin pertanian), rumah kompos, toko desa, pasar desa, dan KUBK (koperasi usaha bersama karet).



Sumber : Keputusan BUMDes Garantung Makmur Nomor 10 tahun 2019, diolah

Gambar 1.1.

Program Usaha dari BUMDes Garantung Makmur

Pada gambar 1.1. menampilkan enam kegiatan usaha yang ada di BUMDes Garantung Makmur. Program utama dan menjadi fokus pemerintah desa yaitu usaha agribisnis jagung hibrida dan penyewaan jasa alsintan. Gambaran unit usaha BUMDes bagian usaha agribisnis yaitu menggarap usaha budidaya jagung hibrida dengan menjalin kerjasama antar petani di sekitar desa maupun di luar desa berupa pembinaan dan pelatihan. Dalam hal ini BUMDes memfasilitasi penjualan dari hasil panen dari petani jagung selain itu BUMDes juga harus berperan untuk mengayoi sehingga menjadi tempat curhat sekaligus mencari solusi bagi para petani.

Selanjutnya unit usaha penyedia jasa alsintan (alat mesin pertanian) ini bukan termasuk jenis usaha tetapi mitra kerja karena unit ini dipegang oleh Dinas Pertanian. Adapun barang yang disewakan berupa exavator 3 unit, jonder 3 unit, handtraktor 8 unit, perontok jagung 6 unit, pompa air 4 unit dan pabrik pengering jagung 1 unit. Pada AD/ART kontribusi ke BUMDes seharga Rp 2.000,00/jam dan Rp 25.000,00/hari.

Sisa dari unit usaha yang belum berjalan dengan maksimal diantaranya yaitu rumah kompos, toko desa, dan KUBK. Unit usaha rumah kompos belum berjalan dengan baik padahal unit usaha ini memiliki potensi yang bagus terutama di perdesaan mengingat permasalahan sampah yang belum terselesaikan secara efektif. Sampah organik di rumah nyatanya bermanfaat untuk keperluan tertentu, yaitu sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Dari unit usaha ini pun dapat berkembang menjadi bank sampah yang pengelolaannya tersebut dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki, namun hal ini belum dimaksimalkan.

Toko desa sudah berjalan dan barang yang diperjualbelikan yaitu obat-obatan pertanian. Unit usaha selanjutnya yang belum berjalan dengan baik yaitu KUBK (koperasi usaha bersama karet). Peran BUMDes adalah sebagai fasilitator yang artinya menghubungkan petani-petani karet dengan pemasok, bank, dan pengolah karet. Lewat badan usaha tersebut, petani karet dapat mengasah kemampuannya lewat berbagai upaya pelatihan, pendanaan, penyediaan sarana/prasarana, dan penghubungan dengan pembeli potensial yang diharapkan akan meningkatkan nilai jual komoditas tersebut, namun hal ini belum berjalan dan terealisasikan.

Dari beberapa usaha ini diharapkan mampu membantu masyarakat Kabupaten Pulang Pisau terkhusus di Desa Garantung dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desa dan meningkatkan pendapatan daerah melalui BUMDes yang ada di desa tersebut. Adapun cara yang digunakan oleh pengelola BUMDes Garantung Makmur dalam mengembangkan usaha serta lembaganya saat ini yaitu dengan cara menggali potensi yang ada desa dengan berlandaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan ketersediaannya masih belum banyak serta mengadakan pelatihan bagi pengelola BUMDes.

Tetapi dari beberapa jenis usaha dan juga produk-produk dari BUMDes Garantung Makmur ini belum secara optimal menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dikarenakan masih rendahnya kapasitas pengurus BUMDes Garantung Makmur dalam hal pengelolaan unit usaha disamping kapasitas dari struktur organisasinya pun belum begitu memadai dan belum pada tahap pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan. Badan usaha ini memiliki banyak unit usaha yang berpotensi besar untuk menjadi usaha yang maju namun kelemahannya berada pada pengelolaan dan kinerja dari banyak usaha ini kurang dimaksimalkan. Fungsi BUMDes sebagai mesin penggerak ekonomi harus mengupayakan dan memaksimalkan unit usaha tersebut agar dapat menghasilkan baik dari sisi kesejahteraan pengurus BUMDes maupun kemakmuran masyarakat desa.

Hal ini menjadi *Fenomena Gap* dan menjadi permasalahan yang hampir di alami oleh seluruh BUMDes di Kabupaten Pulang Pisau. Dimana dalam pelaporan keuangannya pun masih di kerjakan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya dikarenakan sistem yang belum standar dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengurusnya, namun bukan itu yang menjadi fokusnya. Dari program dan usaha yang cukup banyak dari BUMDes ini, dirasa sangat penting untuk menunjang keberjalanan dari BUMDes maupun perputaran ekonomi di dalam desa. Akibatnya jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan benar, penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes dan anggaran dana desa berpotensi tidak sesuai ketentuan.

Problem tersebut berdampak kepada kinerja sumber daya manusia yaitu pengurus BUMDes yang menjadi kunci keberhasilan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Selain pengurus juga harus mempuni dan memiliki kemampuan manajerial kewirausahaan agar lembaga bisa berjalan dengan baik, karena hal ini berpengaruh kepada pertumbuhan laba di dalam suatu badan usaha.

Ketidakoptimalan dalam bidang kapasitas pengelolaan produksi dan Sumber Daya menjadi latar belakang utama yang mendorong peneliti untuk menyusun strategi peningkatan dan pengembangan badan usaha ini sehingga dapat memaksimalkan kegiatan usaha melalui pendekatan peningkatan kapasitas BUMDes. Berbagai program usaha telah dikerahkan namun hasilnya belum memuaskan.

Permasalahan pada BUMDes Garantung Makmur yang dikemukakan oleh Kepala Desa Garantung di Kabupaten Pulang Pisau dan pemerintah desa yang sekaligus yang menjadi tokoh masyarakat pada saat *pra-survey* mengenai perkembangan BUMDes Garantung Makmur dari aspek ekonomi yaitu perlunya menggalakan satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat desa. Berikut permasalahan yang dihadapi BUMDes Garantung Makmur dari sudut pandang Kepala Desa Kabupaten Pulang Pisau dan pengurus BUMDes, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.

Permasalahan BUMDes Garantung Makmur

Versi Kepala Desa	Versi Pengurus BUMDes
Kurang optimalnya pengelolaan unit usaha yang berdampak kepada menurunnya PADes juga rendahnya kreaktifitas berwirausaha masyarakat desa.	Ketidakoptimalan dalam bidang kapasitas pengelolaan produksi dan tidak bertumbuhkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.

Sumber : Pra-survey, 30 September 2019, diolah

Hasil audit dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengemukakan persoalan utama yaitu belum adanya suatu inovasi bagaimana cara unit usaha yang ada di BUMDes mampu mensejahterakan masyarakat desa, maka dari itu perlu adanya kolaborasi menuangkan pikiran positif untuk menyusun program yang jitu untuk mengurangi penduduk miskin dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan ini merupakan permasalahan utama seperti yang di kemukakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam *pra-survey* Kepala Desa Garantung yang sekaligus menjadi penasehat BUMDes Garantung Makmur memiliki harapan ada suatu strategi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Faktor penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah dengan strategi yang baik. Dari tabel 1.1. terlihat bahwa desa yang ada di kabupaten pulang pisau harus ditingkatkan dan dengan adanya strategi untuk BUMDes Garantung Makmur semoga menjadi BUMDes percontohan yang sukses bagi BUMDes-BUMDes yang lainnya.

Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan Desa Garantung di Kabupaten Pulang Pisau sebagai objek penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garantung Makmur Sebagai Mesin Penggerak Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, agar tidak melebar (menjadi luas) dari tujuan awal pembahasan. Maka dari itu Penulis membatasi diri hanya membahas variabel yang berkaitan dengan strategi pengembangan BUMDes, pada:

1. Unit penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa Garantung Makmur.
2. Lingkup wilayah penelitian berada di Desa Garantung.
3. Lokasi penelitian yaitu di Desa Garantung Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
4. Dalam penelitian ini dilakukan pada rentan tahun 2019.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja Faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan BUMDes Garantung Makmur?
2. Bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes Garantung Makmur yang harus diprioritaskan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan BUMDes Garantung Makmur.
2. Merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap keilmuan yang selanjutnya dapat dikembangkan di Prodi Ekonomi UMY.
 - c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengembangkan teori organisasi masyarakat.
2. Bagi Penulis
 - a. Penulis dapat melihat dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Prodi Ekonomi UMY ke dalam sebuah karya ilmiah.
 - b. Mengetahui sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
3. Bagi Desa
 - a. Memberikan kontribusi bagi desa untuk dapat melihat sejauh mana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa terhadap potensi yang dimiliki oleh desa.